

Tragedi bencana sumatera: korban tewas capai 1.006 orang dan upaya penyelamatan

Silvi Nur Afifa Darmayanti

Program studi Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: 220601110099@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

aceh, banjir bandang, bencana, BNPB, deforestasi, korban, mitigasi, perubahan iklim, Sumatera

Keywords:

aceh, flash floods, disasters, BNPB, deforestation, victims, mitigation, climate change, Sumatera

ABSTRAK

Tragedi bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 merupakan salah satu peristiwa paling mematikan dalam sejarah Indonesia kontemporer. Dipicu oleh curah hujan ekstrem yang dipengaruhi Siklon Tropis Senyar serta faktor antropogenik seperti deforestasi masif dan tambang ilegal, bencana ini menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur, pemukiman, dan lahan pertanian di wilayah pegunungan dan dataran rendah. Hingga 13 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total korban meninggal dunia mencapai 1.006

jiwa, dengan distribusi sekitar 415 jiwa di Aceh, 349 jiwa di Sumatera Utara, dan 242 jiwa di Sumatera Barat. Selain itu, 217 orang masih dinyatakan hilang, lebih dari 5.400 orang luka-luka, serta ratusan ribu rumah rusak berat, memaksa hampir 900.000 warga mengungsi. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia menjadi korban terbanyak, disertai risiko sekunder berupa wabah penyakit dan trauma psikologis. Upaya penyelamatan dan tanggap darurat dilakukan secara intensif oleh BNPB, TNI, Polri, Basarnas, serta ribuan relawan, dengan dukungan internasional dari UNICEF dan WHO. Operasi pencarian menggunakan helikopter, drone, dan alat berat berhasil mengevakuasi puluhan ribu jiwa, sementara distribusi logistik mencapai ratusan ton makanan, obat-obatan, dan tenda. Fase rehabilitasi mulai bergulir dengan normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur darurat, dan rencana mitigasi jangka panjang seperti reboisasi dan sistem peringatan dini.

ABSTRACT

The hydrometeorological disaster tragedy of flash floods and landslides that struck the provinces of Aceh, North Sumatra, and West Sumatra since late November 2025 is one of the deadliest events in contemporary Indonesian history. Triggered by extreme rainfall influenced by Tropical Cyclone Senyar and anthropogenic factors such as massive deforestation and illegal mining, this disaster caused widespread damage to infrastructure, settlements, and agricultural land in mountainous and lowland areas. As of December 13, 2025, the National Disaster Management Agency (BNPB) recorded a total of 1,006 deaths, with approximately 415 in Aceh, 349 in North Sumatra, and 242 in West Sumatra. In addition, 217 people are still listed as missing, more than 5,400 injured, and hundreds of thousands of homes severely damaged, forcing nearly 900,000 residents to evacuate. Vulnerable groups such as children and the elderly are the most affected, with secondary risks such as disease outbreaks and psychological trauma. Rescue and emergency response efforts were intensively carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB), the Indonesian National Armed Forces (TNI), the Indonesian National Police (Polri), the National Search and Rescue Agency (Basarnas), and thousands of volunteers, with international support from UNICEF and the WHO. Search operations using helicopters, drones, and heavy equipment successfully evacuated tens of thousands of people, while logistics distribution reached hundreds of tons of food, medicine, and tents. The rehabilitation phase began with river normalization,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Tragedi bencana alam yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025 telah menjadi salah satu peristiwa paling menghancurkan dalam sejarah modern Indonesia. Banjir bandang disertai tanah longsor yang dipicu oleh curah hujan ekstrem melanda tiga provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini dimulai sekitar tanggal 25 November 2025, ketika siklon tropis yang tidak terduga membawa hujan lebat selama berhari-hari, menyebabkan sungai-sungai besar seperti Batang Toru di Sumatera Utara dan Krueng Aceh di Aceh meluap secara dramatis. Wilayah pegunungan yang rawan longsor, seperti di sekitar Gunung Marapi dan Singgalang, semakin memperburuk situasi dengan aliran lahar dingin yang membawa material vulkanik ke pemukiman penduduk. Fenomena ini bukan hanya ujian bagi ketahanan alam, tetapi juga cerminan dari tantangan perubahan iklim global yang semakin mempercepat frekuensi bencana hidrometeorologi di kawasan tropis seperti Indonesia.

Dampak awal bencana terasa begitu cepat dan luas, dengan ribuan rumah tangga terendam air setinggi 5-10 meter di daerah rendah dan longsor yang menimbun desa-desa terpencil. Di Aceh, khususnya Kabupaten Pidie dan Aceh Utara, banjir bandang menghancurkan infrastruktur jalan raya dan jembatan, memutus akses transportasi utama menuju ibu kota provinsi. Sementara itu, di Sumatera Barat, longsor di Kabupaten Agam dan Tanah Datar menewaskan puluhan warga dalam semalam, dengan puing-puing tanah yang bercampur lumpur menutupi ladang pertanian dan sekolah-sekolah. Sumatera Utara, sebagai provinsi terdampak terberat secara keseluruhan, mengalami kehancuran di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, di mana sungai-sungai kecil yang biasanya tenang berubah menjadi arus deras yang merobek lereng bukit. Total, lebih dari 157.000 rumah rusak berat, dan sekitar 833.000 warga terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara, menciptakan krisis kemanusiaan yang mendesak.

Korban jiwa menjadi angka paling tragis dari bencana ini, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total 1.006 orang meninggal dunia hingga 13 Desember 2025. Distribusi korban tersebar tidak merata: Aceh mencatat 407 tewas, Sumatera Utara 343, dan Sumatera Barat 256, dengan tambahan 217 orang masih hilang yang kemungkinan besar telah menjadi korban. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan, di mana kasus-kasus hipotermia dan penyakit pasca-banjir seperti diare akut melonjak tajam. Selain itu, 5.400 orang mengalami luka-luka serius, mulai dari patah tulang akibat longsor hingga infeksi kulit dari air kotor. Angka ini bukan hanya statistik, melainkan cerita kehilangan dari ribuan keluarga yang kehilangan pencari nafkah utama, memperburuk kemiskinan struktural di wilayah pedesaan Sumatera yang bergantung pada pertanian subsisten.

Upaya penyelamatan segera digulirkan oleh pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, yang menetapkan status darurat nasional untuk mempercepat mobilisasi sumber daya. Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) mengerahkan helikopter dan tim penyelam ke lokasi terpencil, berhasil mengevakuasi lebih dari 50.000 warga dalam 48 jam pertama. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan

Polri turut serta dalam operasi pencarian dan evakuasi, menggunakan peralatan berat untuk membersihkan puing longsor dan mendirikan posko kesehatan darurat. Bantuan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, dan tenda pengungsian dikirim dari provinsi tetangga seperti Riau (Rp3 miliar tunai) dan Jawa Barat, sementara PBB melalui badan-badan seperti UNICEF dan WHO menjanjikan dukungan internasional untuk pencegahan epidemi. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan tanggap darurat, dengan BNPB sebagai pusat kendali yang memantau data real-time melalui satelit dan drone. Relawan lokal dari organisasi seperti Palang Merah Indonesia (PMI) memainkan peran vital dalam distribusi bantuan, mencapai desa-desa yang sulit dijangkau kendaraan. Upaya ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga mencegah korban tambahan dari kelaparan atau penyakit, dengan lebih dari 1 juta orang menerima paket bantuan dasar dalam seminggu pertama. Namun, tantangan seperti jaringan komunikasi yang putus di Sumatera Barat sempat menghambat koordinasi, sehingga Menteri Komunikasi dan Digital memprioritaskan pemulihan infrastruktur telekomunikasi.

Menuju fase rehabilitasi, pemerintah beralih fokus ke rekonstruksi jangka panjang, termasuk normalisasi sungai oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I yang membersihkan alur Sungai Batanghari dan Krueng Meureudu menggunakan alat berat. Program mitigasi juga ditingkatkan, seperti penanaman kembali hutan di daerah rawan longsor untuk mengurangi deforestasi yang disebabkan aktivitas tambang ilegal—faktor yang diduga memperburuk banjir kali ini. Pendidikan kesiapsiagaan bencana ditingkatkan di sekolah-sekolah, sementara anggaran darurat Rp10 triliun dialokasikan untuk pemulihan infrastruktur dalam 100 hari ke depan. Kolaborasi dengan lembaga riset seperti BRIN diharapkan menghasilkan model prediksi banjir yang lebih akurat berbasis AI. Tragedi Sumatera 2025 ini menjadi pengingat pahit akan kerapuhan ekosistem kita di tengah perubahan iklim, tetapi juga bukti ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi musibah. Dengan 1.006 nyawa yang hilang, kita tidak hanya berduka, tapi juga berkomitmen untuk membangun kembali yang lebih tangguh. Upaya penyelamatan yang heroik ini harus menjadi fondasi bagi kebijakan nasional yang proaktif, memastikan bahwa generasi mendatang tidak lagi mengalami penderitaan serupa. Harapan terbesar adalah agar bencana ini memicu transformasi menuju Indonesia yang lebih hijau dan siap bencana, di mana korban bukan lagi angka, melainkan pelajaran berharga untuk masa depan.

Pembahasan

Tragedi Bencana Alam

Tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terparah dalam sejarah Indonesia modern. Dipicu oleh curah hujan ekstrem akibat pengaruh Siklon Tropis Senyar yang melintas Selat Malaka, bencana ini menyebabkan sungai-sungai besar meluap secara tiba-tiba, disertai aliran lahar dingin dan material longsor dari lereng pegunungan. Wilayah seperti Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatera Utara, Agam di Sumatera Barat, serta Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi pusat dampak terberat, di mana banjir bandang membawa gelombang kayu

dan batu besar yang menghancurkan pemukiman. Hingga 13 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total korban meninggal dunia mencapai 1.006 jiwa, dengan ratusan orang masih hilang dan ribuan luka-luka. Distribusi korban menunjukkan Aceh sebagai provinsi dengan angka tertinggi di awal, diikuti Sumatera Utara (sekitar 343-347 jiwa) dan Sumatera Barat (sekitar 240-256 jiwa). Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan menjadi korban mayoritas, dengan banyak kasus kematian akibat terseret arus, tertimbun longsor, atau hipotermia di air dingin.

Dampak material sangat luas, dengan lebih dari 157.000 rumah rusak berat, puluhan jembatan putus, ratusan sekolah dan fasilitas kesehatan hancur, serta lahan pertanian seluas ribuan hektare terendam lumpur. Lebih dari 884.000-894.000 warga terpaksa mengungsi ke posko darurat, menciptakan krisis kemanusiaan yang melibatkan jutaan orang terdampak secara keseluruhan. Isolasi desa-desa terpencil akibat jalan putus memperburuk situasi, di mana pasokan makanan dan air bersih sempat terhambat. Faktor penyebab utama adalah kombinasi cuaca ekstrem dengan degradasi lingkungan jangka panjang, termasuk deforestasi masif untuk perkebunan sawit, tambang ilegal, dan alih fungsi lahan yang mengurangi daya serap air tanah. Hujan intens dalam waktu singkat menyebabkan limpasan permukaan berlebih, mempercepat erosi lereng dan memicu longsor beruntun. Kayu gelondongan dari hutan yang ditebang ilegal berubah menjadi "proyektil" mematikan saat terbawa banjir bandang. Tragedi ini tidak hanya menimbulkan kerugian jiwa dan materi triliunan rupiah, tapi juga trauma psikologis mendalam bagi penyintas yang kehilangan keluarga dan mata pencaharian. Banyak desa lenyap tertimbun, meninggalkan lanskap lumpur dan puing yang sulit dibayangkan sebelumnya. Secara keseluruhan, bencana Sumatera 2025 menjadi pengingat keras akan dampak perubahan iklim yang memperburuk frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, sekaligus menyoroiti kerentanan struktural akibat pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan.

Upaya Penyelamatan

Upaya penyelamatan dan tanggap darurat dilakukan secara masif di bawah koordinasi BNPB, dengan status darurat nasional yang diberlakukan sejak awal Desember 2025. Presiden Prabowo Subianto secara langsung meninjau lokasi terdampak di beberapa provinsi dan memerintahkan mobilisasi sumber daya penuh, termasuk alokasi anggaran darurat serta percepatan rehabilitasi infrastruktur kritis seperti jembatan dan jalan nasional. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan lebih dari 9.000 personel dikerahkan untuk operasi pencarian dan evakuasi, menggunakan helikopter, drone, alat berat, serta bahkan gajah Sumatra untuk membersihkan puing di medan sulit. Hingga pertengahan Desember, ribuan jasad ditemukan dan dievakuasi, sementara pencarian korban hilang terus berlanjut meski dihambat cuaca labil dan akses terputus.

Distribusi bantuan logistik menjadi fokus utama, dengan ratusan ton makanan siap saji, obat-obatan, tenda, dan air bersih dikirim melalui jalur udara dan darat ke posko pengungsian. Organisasi seperti Palang Merah Indonesia (PMI), UNICEF, dan WHO berperan aktif dalam pencegahan wabah penyakit pasca-banjir, seperti ISPA dan infeksi kulit yang melonjak di kalangan pengungsi. Pemulihan infrastruktur dasar dilakukan cepat, termasuk pembangunan jembatan darurat, normalisasi sungai oleh Kementerian

PUPR, serta restorasi jaringan komunikasi dan listrik yang sempat padam total di beberapa kabupaten. Bantuan dari provinsi tetangga dan internasional mengalir deras, termasuk dukungan teknologi seperti Starlink untuk konektivitas di daerah terisolasi. Koordinasi antarlembaga melalui dashboard BNPB memungkinkan pemantauan real-time, membantu optimalisasi sumber daya dan pencegahan korban tambahan dari kelaparan atau penyakit. Posko kesehatan darurat didirikan di ratusan titik, menangani ribuan pasien luka-luka dan rentan. Menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pembangunan kembali rumah tangguh bencana, penanaman hutan ulang, serta audit ketat terhadap aktivitas tambang dan perkebunan yang diduga memperburuk kerentanan. Program mitigasi jangka panjang, seperti sistem peringatan dini berbasis AI dan edukasi kesiapsiagaan masyarakat, mulai digulirkan untuk mencegah pengulangan tragedi serupa.

Kesimpulan dan Saran

Tragedi banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir 2025 merupakan salah satu bencana hidrometeorologi terburuk di Indonesia, dengan korban meninggal dunia mencapai lebih dari 1.006 jiwa hingga 13 Desember 2025, disertai ratusan orang hilang dan ribuan luka-luka. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kehilangan nyawa yang masif, tetapi juga menghancurkan infrastruktur, rumah tangga, dan mata pencaharian jutaan warga di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, meninggalkan luka mendalam bagi bangsa. Meskipun dipicu oleh curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, tragedi ini memperlihatkan kerentanan struktural yang diperburuk oleh degradasi lingkungan jangka panjang, seperti deforestasi, tambang ilegal, dan alih fungsi lahan yang mengurangi kapasitas serap air tanah. Kombinasi faktor alam dan antropogenik ini mengubah hujan deras menjadi banjir bandang mematikan, menegaskan bahwa bencana semacam ini bukan sekadar "musibah alam" belaka, melainkan konsekuensi dari pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, upaya penyelamatan dan tanggap darurat yang masif oleh BNPB, TNI, Polri, relawan, serta dukungan internasional menunjukkan ketangguhan dan solidaritas nasional yang luar biasa. Ribuan personel dikerahkan, bantuan logistik didistribusikan cepat, dan fase rehabilitasi mulai digulirkan, berhasil menyelamatkan puluhan ribu nyawa serta mencegah korban tambahan dari wabah dan kelaparan. Untuk mencegah pengulangan tragedi serupa, diperlukan saran konkret seperti penguatan mitigasi melalui reboisasi masif di daerah aliran sungai kritis, penegakan hukum ketat terhadap aktivitas tambang dan perkebunan ilegal, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi AI yang lebih akurat. Pemerintah juga disarankan untuk merevisi tata ruang wilayah rawan bencana, memprioritaskan relokasi pemukiman berisiko tinggi, dan meningkatkan edukasi kesiapsiagaan masyarakat agar generasi mendatang lebih tangguh menghadapi ancaman perubahan iklim.

Daftar Pustaka

- Akbar, R., Asyura, F., Novita, N., Safitri, F., & Fitria, F. (2025). ANALISIS KESIAPSIAGAAN DAN RESPON MASYARAKAT ACEH TERHADAP BENCANA HIDROMETEOROLOGI: STUDI KASUS PASCA-BANJIR BANDANG SUMATERA TAHUN 2025. *JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE*, 11(2), 778-785.
- Damanik, M. R. S., & Restu. (2011). Pemetaan tingkat risiko banjir dan longsor Sumatera Utara berbasis sistem informasi geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(1), 326-33. (n.d.).
- Dewi, R., & Saleh, M. (2026). Banjir Sumatera Sebagai Pemicu Kesadaran Publik tentang Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 2(1).
- Hermon, D. (2012). Mitigasi bencana hidrometeorologi: Banjir, longsor, kekeringan, dan puting beliung. UNP Press. https://www.researchgate.net/publication/376086819_Penyuluhan_Bahaya_dan_Upaya_Mitigasi_Bencana_Hidrometeorologi_di_Desa_Lembah_Sari_Kecamatan_Batu_Layar_Kabupaten_Lombok_Barat
- Hidayat, R., et al. (2015). Analisis banjir bandang Kota Sabang. *Jurnal Ilmu Kebencanaan Aceh (JIKA)*, 2(4), 1-15. <https://jurnal.usk.ac.id/JIKA/article/download/11743/9300>
- Iswandi, U. (2023). Identifikasi potensi bencana banjir dan upaya mitigasi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara*, 1(1), 1-12. <https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jimnu/article/download/56/59>
- Paimin, Sukresno, & Pramono, I. B. (2010). Teknik mitigasi banjir dan tanah longsor. Tropenbos International Indonesia Programme. <https://www.tropenbos-indonesia.org/file.php/337/teknik-mitigasi-dan-tanah-longsor.pdf>
- Rahmad, R., Suib, & Nurman, A. (2018). Aplikasi SIG untuk pemetaan tingkat ancaman longsor di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Sinambela, M. (2024). Pendekatan AI dan data sains dalam bencana geo-hidrometeorologi di Sumatera Utara. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/390342283_Pendekatan_AI_dan_Data_Sains_dalam_Bencana_Geo-Hidrometeorologi_di_Sumatera_Utara